

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan pesat UMKM menunjukkan bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang memanfaatkan peluang ekonomi untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), sektor UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih kurang 97% tenaga kerja di Indonesia.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pedoman bagi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, relevan, dan dapat dipercaya. SAK EMKM mulai diberlakukan secara resmi pada Januari 2018 dan ditujukan bagi UMKM yang tidak diwajibkan menggunakan standar akuntansi yang lebih kompleks seperti SAK ETAP atau PSAK. Standar ini mencakup tiga elemen utama dalam laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Implementasi SAK EMKM diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan UMKM, yang berperan penting dalam menarik minat investor serta memperoleh akses pendanaan dari lembaga keuangan.

Dengan pesatnya perkembangan sektor UMKM, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan guna mendukung keberlanjutan UMKM, termasuk penerapan SAK EMKM. Penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM, memudahkan akses pembiayaan, dan meningkatkan kredibilitas bisnis di mata investor serta lembaga keuangan (Hidayati, 2022). Meski demikian, implementasi SAK EMKM masih menghadapi tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal, seperti minimnya pemahaman dan keterbatasan sumber daya.

Di Kota Palembang, penerapan SAK EMKM masih membutuhkan perhatian khusus. Kota ini memiliki konsentrasi UMKM yang tinggi, terutama dalam sektor makanan. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil masih kurang memahami pentingnya akuntansi yang baik dan pembuatan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Menurut Sari (2021), salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman terhadap akuntansi dan minimnya pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang akuntansi turut memperburuk situasi ini (Wahyuni, 2024). Akibatnya, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, yang berdampak pada kelangsungan bisnis mereka serta akses terhadap pendanaan (Prasetyo, 2023).

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas UMKM, seperti pelatihan akuntansi dan pendampingan dalam penerapan SAK EMKM. Namun, efektivitas program-program ini masih terkendala oleh rendahnya partisipasi pelaku UMKM dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah (Wahyuni, 2024). Oleh karena itu,

diperlukan upaya optimal dalam mengembangkan program-program tersebut agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. UMKM, terutama di sektor makanan, memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi baru, terutama di wilayah perkotaan seperti Palembang.

Menurut Prasetyo (2023), salah satu tantangan terbesar dalam penerapan SAK EMKM di kalangan UMKM adalah kurangnya pemahaman mengenai akuntansi yang sesuai dengan standar tersebut. Hal ini diperburuk dengan minimnya pelatihan dan sosialisasi, sehingga banyak pelaku UMKM masih menggunakan metode pencatatan keuangan yang sederhana dan tidak sistematis. Akibatnya, banyak UMKM mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, yang dapat berdampak pada pertumbuhan serta keberlanjutan usaha mereka (Rizki, 2021).

Selain itu, keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan akuntansi juga menjadi kendala utama dalam penerapan SAK EMKM, khususnya di sektor makanan di Palembang. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diatur dalam SAK EMKM (Wahyuni, 2024). Kondisi ini menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, yang pada akhirnya memengaruhi pengambilan keputusan bisnis serta akses terhadap pendanaan dari lembaga keuangan.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan penerapan SAK EMKM adalah sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Pelatihan yang melibatkan praktisi akuntansi dan lembaga terkait dapat membantu pelaku

UMKM memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik serta cara menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku (Hidayati, 2022). Di Palembang, meskipun berbagai program pelatihan telah diadakan, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkannya secara optimal.

Beberapa faktor internal yang memengaruhi penerapan SAK EMKM meliputi rendahnya pemahaman akuntansi, kurangnya pelatihan, serta keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan akuntansi. Sementara itu, faktor eksternal yang turut berpengaruh mencakup dukungan kebijakan yang belum optimal, keterbatasan anggaran untuk pendampingan UMKM, serta meningkatnya persaingan usaha (Wahyuni, 2024). Hasil survei awal terhadap 30 pelaku UMKM di Kota Palembang menunjukkan bahwa hanya 10 UMKM atau sekitar 33,33% yang memahami dan menerapkan standar pelaporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Sebagai langkah dalam meningkatkan implementasi SAK EMKM, perguruan tinggi di Palembang dapat berperan aktif dalam mendukung UMKM. Universitas dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku UMKM untuk menyelenggarakan pelatihan serta pendampingan akuntansi. Kegiatan pelatihan yang melibatkan praktisi akuntansi dan lembaga terkait dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik serta cara menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku (Hidayati, 2022).

Di Palembang, berbagai jenis usaha mikro dan kecil di sektor makanan berkembang, mulai dari warung makan sederhana hingga restoran serta kafe dengan segmentasi pasar yang lebih luas. Penerapan SAK EMKM yang tepat

dapat membantu usaha-usaha ini dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses pembiayaan dari lembaga keuangan yang mengharuskan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang diakui (Rizki, 2021). Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SAK EMKM dalam UMKM sektor makanan di Palembang menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Makanan di Kota Palembang”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan penerapan SAK EMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor internal apa saja yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Palembang?
2. Faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis faktor internal yang mempengaruhi penerapan SAK-EMKM pada UMKM di Kota Palembang.

2. Untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan SAK-EMKM pada UMKM di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur akuntansi, khususnya terkait dengan implementasi SAK EMKM pada UMKM.
2. Memperluas pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi standar akuntansi pada usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Menjadi referensi dan landasan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi UMKM dan pengembangan standar akuntansi.
4. Mengembangkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan standar akuntansi pada UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kota Palembang dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif.
2. Membantu pelaku UMKM dalam memahami pentingnya penerapan SAK-EMKM dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

3. Menjadi referensi bagi lembaga pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam merancang strategi peningkatan kapasitas akuntansi.
4. Memberikan rekomendasi praktis kepada asosiasi UMKM dan pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan program pendampingan.
5. Meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pencatatan keuangan yang terstandar dan akuntabel.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan konteks penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, variabel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan, dan saran untuk penelitian mendatang.